



**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Arif Wicaksono**

**NIM 7311414210**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian

skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 2 Juli 2018.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen



Rini Setyo Witiastuti, S.E., M.M.  
NIP. 197610072006042002

Pembimbing 1

Anindya Ardiansari, S.E., M.M.  
NIP. 198407232008122004

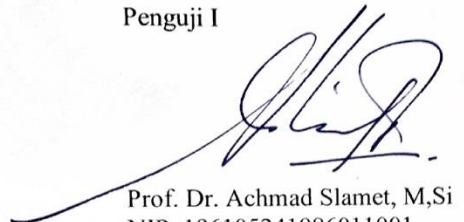
## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Skripsi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin


Tanggal : 23 Juli 2018

Penguji I



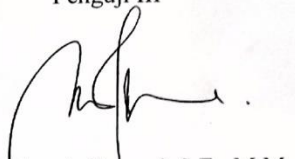
Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si  
NIP. 196105241986011001

Penguji II



Dr. Arief Yulianto, SE, MM  
NIP. 197507262000121001

Penguji III



Anindya Ardiansari, S.E., M.M.  
NIP.198407232008122004



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
UNNES  
Drs. Heri Yanto, M. B. A., Ph.D  
NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wicaksono

NIM : 7311414210

Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 8 April 1996

Alamat : Piasa Kulon Rt 04 Rw 03, Kecamatan Somagede,  
Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2018



Arif Wicaksono  
NIM. 7311414210

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS.ar-Ra’d:11).

“Salah itu wajar, tapi kalau tidak belajar dari kesalahan, itulah kesalahan sebenarnya” (Bill Gates).

### **Persembahan**

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater Unnes.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)” dengan baik dan lancar untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Dalam penulisan skripsi penulis banyak mendapat bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak dalam hal membimbing, mengumpulkan data, dan saran-saran. Pada kesempatan ini penulis menyatakan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, M. B. A., Ph.D Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti Program Manajemen S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Rini Setyo Witiastuti, S.E., M.M., Ketua Jurusan Manajemen Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

4. Anindya Ardiansari, S.E., M.M., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
5. Seluruh dosen dan Staff Tata Usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
6. Teman-teman perkumpulan 12 CM, Ibu Guru Novi, Ipin, Penghuni Losmen Gendeng, Teman Akustik, Teman Manajemen Angkatan 2014 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan hiburan agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Semoga Allah Ta'ala membalas semua kebaikan kita semua. Penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan maupun pembahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Juli 2018

Penulis



## SARI

Wicaksono, Arif. 2018. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan. Skripsi. Jurusan Manajemen S1. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Anindya Ardiansari, S.E., M.M.

**Kata Kunci:** Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, ROE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap profitabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Sampel digunakan sebanyak 45 perusahaan.

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model dengan program Eviews-9. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan analisis regresi linier berganda, yaitu analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang lebih dari satu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*, yaitu penentuan sampel atas dasar kesesuaian karakteristik dan kriteria tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan dewan direksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Simpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bagi perusahaan untuk mempertimbangkan komisaris independen dan komite audit yang telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Bagi investor yang hendak melakukan investasi kedalam suatu perusahaan harus lebih memperhatikan indikator penerapan GCG dari suatu perusahaan tersebut. Salah satu cara pengukuran berhasil atau tidaknya penerapan GCG yakni dengan melihat kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja keuangannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti indikator indikator dari GCG agar lebih memperluas wawasan tentang GCG. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti di sektor lain, Hal ini dapat menambah wawasan tentang keadaan GCG di setiap sektor.



## ABSTRACT

Wicaksono, Arif. 2018. The Influence of Good Corporate Governance To The Profitability Of The Company. Thesis. Management Department S1. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Anindya Ardiansari, S.E., M.M.

**Keywords:** Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, ROE

This study aims to determine the effect of independent commissioners, audit committee, and board of directors on the profitability. This is a quantitative study using purposive sampling technique. The population are Manufacturing Companies listed in Indonesian Stock Exchange period 2012-2016. The sample of this study is 45 companies.

The methods is regression of panel data with Fixed Effect Model using Eviews-9 program. Data analysis technique used in this research is to use descriptive statistics and inferential statistic with multiple linear regression analysis, that is analysis able to explain relation between dependent variable with independent variable more than one. Sampling in this research is done by using purposive sampling method, that is determination of sample based on suitability of certain characteristics and criteria.

The result of this study showed that independent commissioners and audit committee have positive on profitability, whereas board of directors have negative significant on profitability.

The conclusions and suggestions related to this research are for companies to consider independent commissioners and audit committees that have been shown to have a positive influence on the profitability of the company. For investors who want to invest into a company should pay more attention to indicators of GCG implementation of a company. One way of measuring the success or failure of GCG implementation is by looking at the performance of the company indicated by its financial performance. For the next researcher is expected to be able to examine indicator of GCG indicator to be more broaden the knowledge about GCG. Further researchers can also research in other sectors, this can add insight into the state of GCG in each sector.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>1.1 DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.2 Latar Belakang.....	1
1.3 Identifikasi Masalah.....	11
1.4 Cakupan Masalah.....	11
1.5 Perumusan Masalah.....	12
1.6 Tujuan Penelitian .....	12
1.7 Manfaat Penelitian .....	13
1.8 Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>

1.1	Kajian Teori Utama .....	15
1.1.1	Teori Keagenan .....	15
2.2	Kajian Variabel Penelitian .....	19
2.2.1	Profitabilitas Perusahaan .....	19
2.2.2	<i>Good Corporate Governance</i> .....	21
2.2.3	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> .....	25
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu .....	34
2.4	Kerangka Berfikir .....	37
2.4.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perusahaan .....	37
2.4.2	Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan .....	38
2.4.3	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan .....	39
2.5	Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Jenis dan Desain Penelitian .....	41
3.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	42
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Operasional .....	44
3.3.1	Variabel Dependen (Y) .....	44
3.3.2	Variabel Independen (X) .....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	46
3.5.1	Analisis Deskriptif .....	46
3.5.2	Metode Penentuan Model Estimasi Data Panel .....	47
3.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	50
3.5.4	Analisis Regresi dengan Model <i>Fixed Effect</i> .....	53
3.5.5	Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	54
3.5.6	Uji Hipotesis .....	55

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	56
4.1.1 Analisis Deskriptif .....	56
4.1.2 Penentuan Model Estimasi Data Panel .....	58
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .....	61
4.1.4 Analisis Regresi dengan Model <i>Fixed Effect</i> .....	64
4.1.5 Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	76
4.1.6 Uji Hipotesis .....	77
4.2 Pembahasan .....	78
4.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perusahaan .....	78
4.2.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan .....	81
4.2.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Simpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Perusahaan Manufaktur Yang Menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Perusahaan di tahun 2016.....	7
Tabel 1.2. <i>Research Gap</i> .....	9
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1. Kriteria Pengambilan Sampel.....	43
Tabel 4.1. Analisis Deskriptif.....	56
Tabel 4.2. Hasil Uji <i>Chow</i> .....	59
Tabel 4.3. Hasil Uji <i>Hausman</i> .....	60
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 4.5. Hasil Uji <i>Durbin-Watson</i> .....	62
Tabel 4.6. Hasil Uji <i>Glejser</i> .....	63
Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas.....	64
Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....	65
Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	76
Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik F.....	77
Tabel 4.11. Hasil Uji Statistik T.....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir..... 40





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016 .....	93
Lampiran 2. Sampel Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2016 (setelah pembuangan data <i>outlier</i> ) .....	94
Lampiran 3. Data ROE, KI, KA, DD .....	95
Lampiran 4. Data ROE, KI, KA, DD (setelah pembuangan data <i>outlier</i> ) .....	103
Lampiran 5. Uji <i>Chow</i> .....	108
Lampiran 6. Uji <i>Hausman</i> .....	109
Lampiran 7. Uji Multikolinieritas .....	110
Lampiran 8. Uji Autokorelasi .....	110
Lampiran 9. Uji Heteroskedastisitas .....	111
Lampiran 10. Uji Normalitas .....	111
Lampiran 11. Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....	112
Lampiran 12. Tabel <i>Durbin-Watson</i> ( $\alpha=5\%$ ) .....	114

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan harus berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara normatif adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Riyantina & Ardiansari, 2017). Upaya pencapaian tujuan perusahaan, maka diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dari manajer perusahaan (Riyantina & Ardiansari, 2017).

*Good corporate governance* (GCG) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Priyadi, 2013). *The Organization for Economic Corporation and Deevlopment* (OECD) mengartikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, termasuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham (Widhianingrum & Amah, 2012).

Isu mengenai GCG mulai mengemuka khususnya di Indonesia, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan pada tahun 1998. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi serta pertanggungjawaban

pemegang saham dan melebarnya struktur dalam proses kepengurusan perusahaan yang tidak efisien, sehingga menyebabkan kinerja perusahaan tidak berjalan secara maksimal. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan yang banyak terjadi pada perusahaan di Indonesia, baik pemerintah maupun investor menyepakati penerapan GCG atau yang biasa dikenal dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Kautsar & Madanika Kusumaningrum, 2015).

*Corporate governance* memiliki dua unsur, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan (Wahyudin & Solikhah, 2017). Internal perusahaan merupakan suatu unsur di dalam perusahaan dan selalu digunakan oleh perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan meliputi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, sistem remunerasi berdasar kinerja, dan komite audit. Unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan yaitu keterbukaan dan kerahasiaan, transparansi, *accountability*, *fairness*, aturan dari *code of conduct* (Wahyudin & Solikhah, 2017). Eksternal perusahaan merupakan unsur yang berasal dari luar perusahaan, dan umum yang selalu diperlukan di luar perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan yaitu kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, dan pengesahan legalitas. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan yaitu aturan dan *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, dan jaminan hukum (Wahyudin & Solikhah, 2017).

Perusahaan yang tidak mengimplementasikan GCG pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat dikenakan

sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian, perusahaan tersebut melanggar hukum (Widhianingrum & Amah, 2012). Perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang (*opportunity*) untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya dengan lancar (*going concern*). Namun sebaliknya, perusahaan yang telah mengimplementasikan GCG dapat menciptakan nilai (*value creation*) bagi masyarakat, pemasok, distributor, pemerintah, dan ternyata lebih diminati para investor sehingga berdampak langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut (Widhianingrum & Amah, 2012).

Penelitian ini lebih berfokus pada unsur *corporate governance* yakni internal perusahaan, dan bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan GCG yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan. Di dalam internal perusahaan terdapat struktur perusahaan dan prinsip GCG yang memiliki peran sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *corporate governance* (Wicaksono, 2014). Struktur *governance*, dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan (Wicaksono, 2014). Struktur *corporate governance* berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS / pemegang saham) (Bukhori, 2012).

Praktik *corporate governance* belum bisa dikatakan baik apabila belum menerapkan struktur perusahaan dan prinsip-prinsip GCG. Berikut standar yang ditentukan oleh peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan Nomor 55/POJK.04/2015 dalam menerapkan struktur perusahaan yang baik, dengan

menentukan jumlah anggota dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi.

1. Komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris
2. Komite audit minimal terdiri dari 3 orang anggota
3. Dewan direksi minimal terdiri dari 2 orang anggota (satu diantaranya menjadi direktur utama atau presiden direktur).

Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh OECD mencakup lima hal, yaitu perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggungjawab dengan dewan komisaris atau direksi. GCG merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham. Hal ini tentu berdampak pada tercapainya suatu sistem pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi para pengguna laporan keuangan (Nugroho & Rahardjo, 2014).

Salah satu cara pengukuran berhasil atau tidaknya penerapan GCG yakni dengan melihat kinerja perusahaan (Safitri & Yulianto, 2015). Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Safitri & Yulianto, 2015).

Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan (Indri Hapsari, 2012). Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kondisi *financial distress* suatu perusahaan melalui analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio – rasio keuangan yang ada (Indri Hapsari, 2012). Dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan dapat mencapai tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut. Salah satu cara dalam menganalisis kinerja keuangan yakni dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan bisnis untuk periode satu sampai lima tahun sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut (Indri Hapsari, 2012)

Analisis rasio dibagi kedalam 5 kelompok besar, yaitu rasio likuiditas, pengelolaan aset, pengelolaan utang, profitabilitas, dan nilai pasar (Muhardi, 2015). Penelitian ini berfokus pada rasio profitabilitas. Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Asset (ROA)*.

Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja perusahaan menggunakan *return on equity (ROE)*. *Return on equity (ROE)* merupakan rasio yang mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang ditanamkan (Muhardi, 2015).

Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel penelitian di perusahaan manufaktur, dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan salah satu industri potensial yang memiliki pengaruh besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia.



Perusahaan manufaktur juga merupakan salah satu perusahaan yang menjadi lahan strategis dalam berinvestasi, karena perkembangannya yang pesat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2008, sektor perusahaan manufaktur merupakan jumlah emiten yang banyak dibandingkan jumlah emiten lain. Jumlah perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI sebesar 148 perusahaan. BEI merupakan barometer aktivitas pasar modal di Indonesia, karena memiliki frekuensi perdagangan dan variasi saham yang besar. Perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEI merupakan perusahaan yang telah memiliki struktur organisasi yang terpisah antar pemilik dan pengelola perusahaannya.

Perusahaan manufaktur tentunya diharapkan sudah mampu menerapkan GCG dengan baik. Penerapan GCG yang baik tentu ditunjukkan dengan penerapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penentuan jumlah anggota dalam struktur organisasi sebagai hal paling mendasar dalam penerapan GCG, hal tersebut harus dilandasi dengan aturan yang berlaku. Keberhasilan penerapan GCG juga dapat dilihat dari kondisi kinerja keuangan perusahaan (Syamsudin, et al., 2017). Perusahaan yang telah menerapkan GCG tentunya dapat menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pula. Namun, fakta yang ada masih terdapat perusahaan manufaktur yang telah menerapkan GCG tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan juga masih ada perusahaan manufaktur yang menerapkan GCG sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi kinerja keuangannya mengalami penurunan. Berikut data penerapan GCG dan profitabilitas perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROE.



Kode Perusahaan	Dewan Komisaris Independen (%)	Komite Audit	Dewan Direksi		
				Persentase	Keterangan
PICO	33	3	2	6.60	Menurun
SCCO	33	3	5	17.25	Naik
SMGR	29	4	7	16.49	Menurun
SMSM	33	3	5	29.31	Menurun
SRSN	38	3	6	4.56	Naik
TCID	40	4	15	31.75	Naik
TOTO	40	3	11	19.12	Naik
TRST	0	3	3	1.29	Menurun
TSPC	50	3	11	12.20	Menurun
ULTJ	33	3	3	24.27	Naik
UNIT	33	4	3	0.16	Naik
UNVR	80	3	11	121.22	Menurun

Sumber: IDX, diolah oleh penulis tahun 2018.

Menurut Widiawati (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar presentase dewan komisaris independen, maka semakin baik profitabilitas perusahaannya. Hasil berbeda ditunjukkan Felimanto (2014) bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan ROE. Hasil penelitian tersebut menunjukkan besar atau kecilnya presentase dewan komisaris independen tidak mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan.

Menurut Yasser, et al. (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan ROE. Hubungan positif dapat diartikan dengan anggota komite audit yang lebih banyak maka profitabilitas perusahaannya akan mengalami peningkatan.



UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Variabel		Hasil
Dewan Komisaris Independen terhadap (X1)	Hestin Sri Widiawati (2013)	Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (ROE)

Variabel		Hasil
Profitabilitas Perusahaan (Y)	Daniel Felimanto dan Yeterina Widi Nugrahanti (2014)	Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROE)
Komite Audit (X2) terhadap Profitabilitas Perusahaan (Y)	Qaiser Rafique Y, Harry Entebang dan Shazali Abu Mansor (2011)	Komite Audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (ROE)
	Tangguh Wicaksono dan Raharja (2014)	Komite Audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROE)
Dewan Direksi (X3) terhadap Profitabilitas Perusahaan (Y)	Faizal Adi Nugroho (2014)	Jumlah Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (ROE)
	Ahsan Akbar (2014)	Jumlah Dewan Direksi memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan (ROE)

Sumber: Ringkasan dari penelitian sebelumnya, diolah tahun 2018.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai GCG yang dihubungkan dengan kinerja keuangan perusahaan, menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu industri potensial yang memiliki pengaruh besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Perusahaan manufaktur juga merupakan salah satu perusahaan yang menjadi lahan strategis dalam berinvestasi, karena perkembangannya yang pesat di Bursa Efek Indonesia (BEI). ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin membuktikan bahwa GCG merupakan hal yang sangat bagus untuk diterapkan pada perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga judul yang penulis ambil yaitu **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan dari *good corporate governance*, dengan teori GCG yang menyatakan ketika perusahaan telah menerapkan GCG dengan baik maka kinerja perusahaan akan meningkat dan dapat dilihat dari laba yang diperoleh. Fakta di Indonesia yang ditunjukkan pada tabel 1.1 yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur yang masih mengalami penurunan pada profitabilitas perusahaan meski telah menerapkan GCG dengan baik.
2. Adanya *research gap* yaitu perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

## **1.3 Cakupan Masalah**

Menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan masalah pada pengaruh GCG terhadap profitabilitas perusahaan dalam analisis *agency theory* berdasarkan *research gap* dari penelitian



terdahulu yaitu proporsi dewan komisaris, komite audit, dewan direksi. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Sejauhmana pengaruh dewan komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur?
2. Sejauhmana pengaruh komite audit terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur?
3. Sejauhmana pengaruh dewan direksi terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan GCG yang terdiri dari indikator:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis maupun praktis:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

Bagi civitas akademika, penelitian ini berguna mengembangkan penelitian dalam bidang ekonomi, khususnya pengujian secara empiris ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan tentang pengaruh GCG terhadap profitabilitas perusahaan dalam *agency theory*.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan untuk dapat memperhatikan kinerja keuangan yang menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kinerja perusahaan, karena dengan melihat tingkat kinerja perusahaan yang baik maka investor akan lebih tertarik dan percaya terhadap perusahaannya, serta memberikan gambaran mengenai GCG pada perusahaan manufaktur dan mengetahui faktor pendukung serta penghambat GCG.

#### 2. Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan para investor dalam pengambilan keputusan bisnis, jangan hanya terfokuskan pada informasi laba tetapi juga mempertimbangkan informasi non-keuangan, seperti keberadaan mekanisme internal perusahaan.

### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan GCG dan ukuran perusahaan di Indonesia.

## 1.7 Orisinalitas Penelitian

Kebaharuan penelitian ini adalah menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas perusahaan dalam analisis *agency theory* pada perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan tahun 2012-2016. Variabel yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris, komite audit, dan dewan direksi yang diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori Utama

##### 2.1.1 Teori Keagenan

*Agency Tehory* merupakan dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan *corporate governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah hubungan yang terjadi antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya. Hubungan tersebut muncul antara pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer, serta *shareholders* dengan kreditor (*bondholders* atau pemegang obligasi). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak antara prinsipal dan agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Haryanto, 2014).

Menurut Bukhori (2012:12) teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara pemilik modal (*principal*) dan *agent*. *Principal* yang tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri menyerahkan tanggung jawab operasional perusahaannya kepada *agent* sesuai dengan kontrak kerja. Pihak manajemen sebagai *agent* bertanggung jawab secara moral dan profesional menjalankan perusahaan sebaik

mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan laba perusahaan. Sebagai imbalannya manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak *principal* melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang telah ditanam berkembang optimal. Menurut Setia Atmaja (2008) pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, sebaliknya manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri.

*Agency problem* muncul sebagai akibat adanya hubungan antara *agent* dengan *principle* ketika timbul konflik antara harapan dan tujuan *principle* dari para direksi (Haryanto, 2014). Manajemen seringkali bertindak tidak seperti yang diharapkan oleh pemegang saham karena juga memiliki kepentingan sendiri, yaitu meningkatkan kemakmuran manajemen sendiri.

Dalam teori ini hubungan antara prinsipal dan agen pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan dikenal *Asymmetric Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen (Sulistiyowati & Fidiana, 2017). Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri. Dengan adanya hal

tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidaktransparan yang dapat menimbulkan konflik prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang adanya praktik GCG pada perusahaan (Sulistiyowati & Fidiana, 2017).

Eisenhard (dalam Wicaksono, 2014), membagi teori keagenan menjadi tiga buah asumsi yaitu: asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*) (Wicaksono, 2014). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya AI antara pemilik perusahaan dan manajemen.

Asumsi tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah komoditi. Informasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan masalah bagi prinsipal dalam mengontrol dan memonitor kinerja agen (Bukhori, 2012). Pihak *principal* sebagai pemilik modal dan pihak yang memberikan mandat terhadap manajer, memberikan kewajiban kepada *agent* untuk memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Dengan demikian di dalam suatu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik *principal* dan kepentingan pribadi agen yang



memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar pula, dengan kata lain kepentingan pribadi agen sendiri (Rahmawati & Khoiruddin, 2017).

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan dua permasalahan yang muncul akibat asimetri informasi yaitu:

1. *Moral Hazard*
2. *Adverse Selection*

Asimetri yang terjadi antara prinsipal dengan agen akan membuka peluang bagi pihak agen untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Bukhori (2012) menjelaskan bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dengan pemilik yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Jensen dan Meckling (1967) ada tiga jenis *agency cost* yaitu:

1. *Monitoring Cost*
2. *Bonding Cost*
3. *Residual Loss*

Adanya posisi, fungsi, kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain (Wicaksono, 2014).

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Profitabilitas Perusahaan**

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu tentang apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat dicerminkan dari harga saham (Wardoyo & Veronica, 2013). Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya yang telah dipakai, dicapai dan dilakukan. Untuk menilai tujuan apakah sudah tercapai atau belum tidaklah mudah, karena menyangkut aspek-aspek manajemen. Menilai kinerja perusahaan baik atau tidaknya dapat dinilai melalui berbagai macam indikator (Riantani & Nurzamzam, 2015). Indikator penilaian kinerja biasanya ada di dalam laporan keuangan. Untuk itu salah satu cara untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan sudah sesuai dengan tujuan yaitu dengan mengetahui dari kinerja keuangan perusahaan tersebut (Riantani & Nurzamzam, 2015).

Menurut Husnan & Pudjiastuti (2006), profitabilitas adalah kemampuan aktiva perusahaan dalam memperoleh laba dari operasi perusahaan. Menurut Sartono (2014), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Jadi, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktivanya secara maksimal sehingga laba yang diperoleh sesuai dengan aktiva yang telah diusahakan perusahaan atau bahkan lebih dari pengorbanan perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas perusahaan dapat

diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut (Munawir, 2012:33).

Menurut Werner R. (dalam Murhadi, 2015) rasio profitabilitas dibagi menjadi 5 (lima) yakni:

1. *Gross profit margin* yakni yang menggambarkan presentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan perusahaan.
2. *Operating profit margin* yakni rasio yang mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba.
3. *Net profit margin* yakni rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari perusahaan.
4. *Return on equity* yakni rasio yang mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah uang yang ditanamkan.
5. *Return on assets* yakni rasio yang mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk aset.

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yakni *return on equity* (ROE) untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila investor ingin melihat seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan *return* atas investasi yang mereka tanamkan yang pertama kali akan dilihat oleh *stakeholder* adalah rasio profitabilitas terutama ROE (Wicaksono, 2014). ROE juga merupakan salah satu rasio yang erat hubungannya dengan *principal* dan agen (Wicaksono, 2014).

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham (Hartono & Nugrahanti, 2014).

Menurut Priyadi (2013) ROE adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba. Jadi dapat diartikan ROE merupakan rasio yang digunakan sebagai tolak ukur perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba. Apabila terjadi kenaikan dalam rasio ROE, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan dan profitabilitas perusahaan semakin efektif (Aprinita, 2016).

Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja manajemen semakin baik sehingga laba bersih dapat meningkat. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ROE sebagai indikator penilaian profitabilitas perusahaan.

## **2.2.2 Good Corporate Governance**

### **1. Pengertian Corporate Governance**

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Sulistiyowati & Fidiana, 2017). *The Organization for Economic Corporation and Deelopment* (OECD) mengartikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, termasuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham (Widhianingrum & Amah, 2012).

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2012, *Corporate Governance* yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut Nugroho & Rahardjo (2014) *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Syamsudin et al., 2017). Sehingga GCG dapat disimpulkan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan.

*Corporate governance* merujuk pada sistem manajemen dan pengendalian perusahaan, sistem tersebut mengarahkan hubungan antara para pemegang saham perusahaan, dewan direksi, serta pihak manajemen senior (Horne and Wachowicz, 2012). Hubungan-hubungan ini memberikan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan perusahaan dan pengawasan kinerja. Karenanya tiga kategori individu menjadi kunci utama keberhasilan tata kelola perusahaan, yaitu pemegang saham biasa yang memilih dewan direksi, dewan direksi perusahaan, para pejabat eksekutif puncak yang dipimpin oleh direktur utama.

## 2. Prinsip *Corporate Governance*

Setiap perusahaan dalam menerapkan GCG harus dilandaskan pada prinsip GCG. Prinsip *Corporate Governance* menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. Kemandirian (*indenpendency*), yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan

5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

### 3. Struktur *Corporate Governance*

Struktur *governance*, dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan (Rahmawati & Khoiruddin, 2017). Struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Salah satu model dalam struktur *governance* yaitu model *Anglo-Saxon*. Struktur *governance* ini terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (perwakilan dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (pihak manajemen sebagai pelaku aktivitas perusahaan). Model *Anglo-Saxon* ini dikenal dengan *Single-board system* yaitu struktur tata kelola perusahaan yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi.

Model *corporate governance* yang lain yaitu *Continental Europe*. Dalam struktur ini *governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Manajer Eksekutif (Wicaksono, 2014). Struktur ini sering disebut *Two-board system*, yaitu struktur *corporate governance* yang memisahkan antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.



Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana dewan komisaris dan dewan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun, penerapan model *two-board system* di Indonesia berbeda dengan model *continental europe*, dimana kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi berada ditangan RUPS. Sehingga dalam model *two-board system* di Indonesia kedudukan direksi sejajar dengan kedudukan dewan komisaris.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perseroan di Indonesia diatur Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada direksi.

### **2.2.3 Mekanisme *Corporate Governance***

Mekanisme *Corporate Governance* adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu (Wahyono, 2012). Mekanisme *corporate governance* adalah suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau



pengawasan terhadap keputusan (Wicaksono, 2014). Jadi mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan dan prosedur antara pihak pengambil keputusan dan pihak pengawasan guna mencapai kondisi tertentu.

Iskandar dan Chamlou (dalam Wahyono, 2012) menunjukkan bahwa mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *eksternal mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti RUPS, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya salah satu mekanisme GCG, diharapkan *monitoring* terhadap manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja perusahaan (Wardoyo & Veronica, 2013).

Penelitian ini berfokus pada unsur *corporate governance* yakni internal perusahaan. Menurut Patria & Yulianto (2017) internal perusahaan yang didalamnya terdapat struktur perusahaan dan juga prinsip *good corporate governance* memiliki peran yang sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *corporate governance*.

KNKG menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana dewan komisaris dan dewan direksi yang

mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk sebuah komite. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit (KNKG, 2006). Sehingga penelitian ini juga menggunakan mekanisme *corporate governance* diantaranya adalah proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi.

### **1. Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi (Sulistiyowati & Fidiana, 2017). KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan GCG. Sementara FCGI mendefinisikan dewan komisaris sebagai inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk

meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasi kegiatan dewan komisaris (Wicaksono, 2014).

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Bukhori (2012) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

KNKG (2006) membedakan dewan komisaris menjadi dua kategori, yaitu dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak perusahaan. Sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang

memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan dengan *controlling shareholders*, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Dalam FCGI (2002) keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki komisaris proporsional. Proporsional disini adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Pengawasan sangat penting keberadaannya dalam perusahaan agar setiap kegiatannya dapat diawasi dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya konflik. Hal ini sangat diperlukan pada perusahaan-perusahaan yang *listing* di BEI yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan kinerja perusahaan. Salah satu badan pengawas yang memiliki wewenang untuk mengawasi direksi adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik (Candradewi, et al., 2016).

Sebagai wakil dari *principal* di dalam perusahaan, dewan komisaris dapat memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan agar tercipta kinerja

perusahaan yang lebih baik. Dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dewan komisaris dapat mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen secara umum. Dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris, manajemen diharapkan dapat lebih memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan (Widiawati, 2013).

## 2. Komite Audit

Keberadaan komite audit di Indonesia didukung oleh perangkat hukum diantaranya Surat Edaran Bapepam (SE-03/PM/2000) yang menghimbau agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit, keputusan BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September serta Keputusan Direksi BEJ No, 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa Efek Jakarta. Selain perangkat hukum, keberadaan komite audit di Indonesia juga didukung dengan didirikannya suatu badan khusus yang menangani permasalahan komite audit di Indonesia, yakni Ikatan Komite Audit Indonesia (*The Indonesian Institute of Audit Committee*). Badan khusus ini merupakan badan yang akan memayungi serta melakukan pendidikan dan pengakuan terhadap kualifikasi anggota komite audit dalam rangka mempercepat transformasi perusahaan menuju GCG (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Menurut tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab)
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi)

Anggota komite audit harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta kepentingan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan atau pemeriksaan, tidak memiliki kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan, dan mampu berkomunikasi secara efektif. Komite audit tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan pengawas (Fahrhani, 2016).

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Menurut KNKG (2006), untuk membangun komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang. Komite audit biasanya perlu mengadakan rapat tugas sampai empat kali dalam setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan

daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan (Fahrhani, 2016).

### **3. Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan (Yasser, et al., 2011). Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat RUPS. Namun, pelaksanaan tugas masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama setara. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* yaitu mengkoordinasikan kegiatan direksi agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif. Dewan direksi bertugas untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang tepat serta menyampaikan laporan pemegang saham atas kinerja perusahaan (Fahrhani, 2016).

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa apabila hanya terdapat satu orang dewan



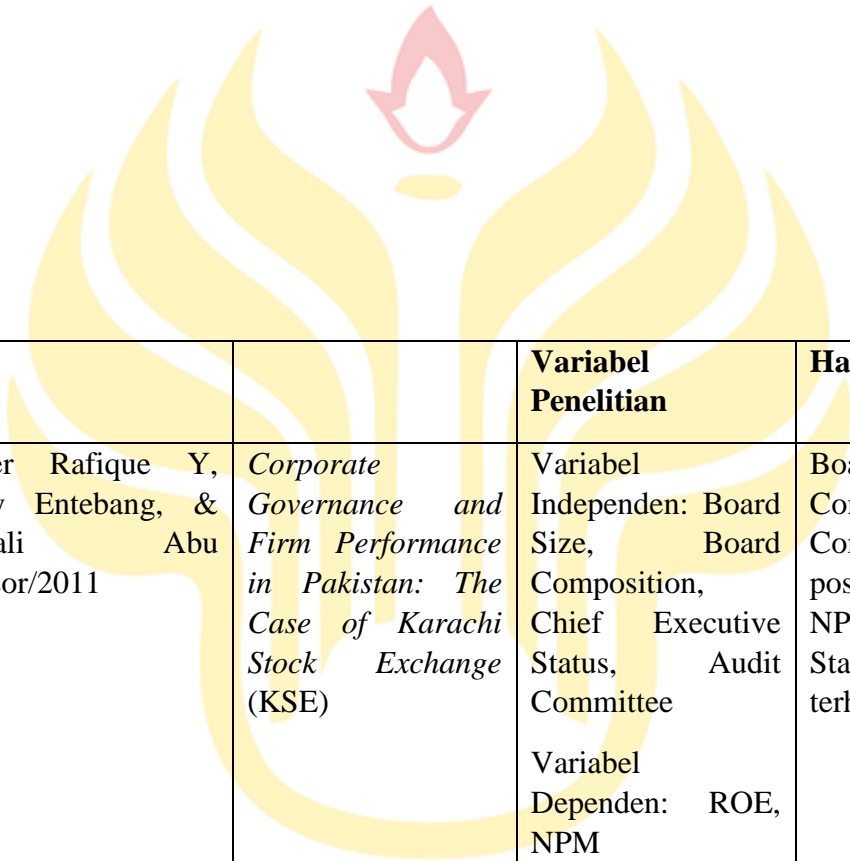
direksi, maka orang tersebutlah yang mewakili perusahaan baik urusan luar maupun dalam. Akan berbeda jika jumlah direksi lebih dari satu orang. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini, dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, dewan direksi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan *strategic* serta pengurangan inefisiensi dan kinerja yang rendah (Hartono & Nugrahanti, 2014).

Di Indonesia, tidak ada batasan jumlah dewan direksi. Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan kinerja yang maksimal tentu memerlukan





		<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Qaiser Rafique Y, Harry Entebang, & Shazali Abu Mansor/2011	<i>Corporate Governance and Firm Performance in Pakistan: The Case of Karachi Stock Exchange (KSE)</i>	Variabel Independen: Board Size, Board Composition, Chief Executive Status, Audit Committee  Variabel Dependen: ROE, NPM	Board Size, Board Composition, Audit Committee berpengaruh positif terhadap ROE dan NPM; Chief Executive Status tidak berpengaruh terhadap ROE dan NPM.
Purweni Widhianingrum dan Nik Amah/2012	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial  Variabel Dependen: ROE	Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan (ROE); Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan (ROE)

		<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Hestin Widiawati/2013	Sri Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, dan Jumlah Komite Audit  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan dan ROE	Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit berpengaruh positif terhadap ROE.
Faizal Nugroho/2014	Adi Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Karakteristik <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel Independen: CSR, Ukuran Dewan Direksi, UKuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit  Variabel Dependen: ROE	CSR, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap ROE; Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap ROE.
	<i>Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Textille Sector of Pakistan</i>	Variabel Independen: Board Size, Ownership Cocentration, Dual Role of CEO  Variabel Dependen: ROA, ROE	Board Size, Ownership Cocentration, Dual Role of CEO berpengaruh positif terhadap ROA; Ownership Cocentration, Dual Role of CEO berpengaruh positif terhadap ROE; Board Size tidak berpengaruh terhadap ROE.

		<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Daniel Felimanto Hartono dan Yeterina Widi Nugrahanti/2014	Pengaruh Mekanisme <i>Coporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit  Variabel Dependen: ROE	Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap ROE; Kepemilikan Manajemen, Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap ROE; Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap ROE.
Achmad Kautsar dan Trias Madanika Kusumaningrum/2015	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Dimediasi Struktur Modal Pada Perusahaan Pertambangan Yang Listed Di BEI 2009-2012	Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan (ROA)  Variabel Intervening: Struktur Modal (DTA)	Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap ROE dan DTA; DTA berpengaruh signifikan terhadap ROA; DTA tidak dapat menjadi variabel mediasi Kepemilikan Manajerial terhadap ROA.
Beatricks Stephani Aprinita/2016	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Goods</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variabel Independen: Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit  Variabel Dependen: Kinerja Keuangan	Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA, ROE, ROI, DER)

		<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
	Indonesia Tahun 2012-2014	Perusahaan (ROA, ROE, ROI, DER)	
Pandu Patria dan Arief Yulianto/2017	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	Variabel Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi Variabel Dependen: Kinerja Perusahaan (ROE)	Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROE); Komite Audit dan Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE)

Sumber: Berbagai artikel ilmiah setelah diolah tahun 2018.

## 2.4 Kerangka Berfikir

### 2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perusahaan

Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham (Candradewi et al., 2016). Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa, semakin banyak jumlah pemonitor, maka kemungkinan terjadinya konflik akan rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost*. Dewan komisaris independen dapat membantu perusahaan terhindar dari ancaman dari luar, sehingga perusahaan dapat mempertahankan sumber

daya perusahaan agar mendapat keuntungan yang lebih yang nantinya dapat meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Widiawati (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dewan komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE. Dewan komisaris independen sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

#### **2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan**

Keberadaan komite audit memiliki peran membantu dewan komisaris dalam mengawasi manajemen demi tercapainya kepentingan para *stakeholder*. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi masalah data-data maupun yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja perusahaan pun akan semakin meningkat.

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Menurut KNKG (2006) untuk membangun komite audit yang efektif, rentan jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang. Penelitian yang dilakukan Yasser et al. (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komite audit terhadap profitabilitas perusahaan.

### 2.4.3 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas Perusahaan

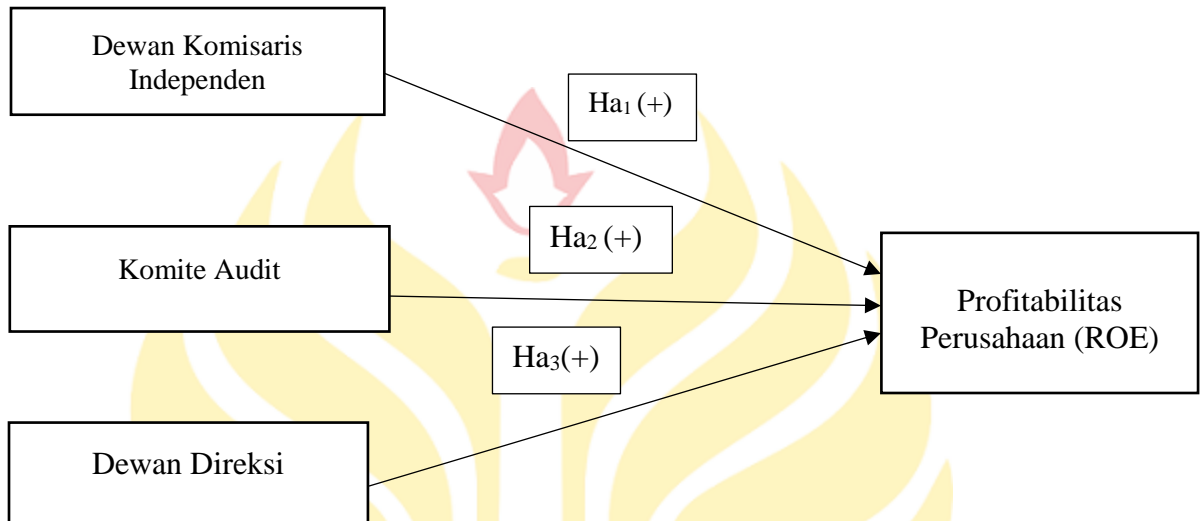
Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa apabila hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka orang tersebutlah yang mewakili perusahaan baik urusan luar maupun dalam. Akan berbeda jika jumlah direksi lebih dari satu orang.

Jumlah dewan direksi akan berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas masing-masing anggota yang tentunya berdampak positif bagi para *stakeholder*. Selain itu, semakin banyak anggota dewan direksi, akan membuat *network* dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik. Ukuran dewan direksi yang ideal, tergantung dari karakteristik masing-masing perusahaan (Nugroho & Rahardjo, 2014). Penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator mekanisme internal *corporate governance* dalam suatu perusahaan yaitu dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi yang mempunyai pengaruh baik atau tidaknya terhadap profitabilitas perusahaan.

Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Sumber: Wicaksono (2014) dikembangkan untuk penelitian

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>1</sub>: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Ha<sub>2</sub>: Komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Ha<sub>3</sub>: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* (GCG) yang terdiri atas komisaris Independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap profitabilitas persahaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa komisaris independen sudah mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional yang berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan dengan dilihat dari kinerja perusahaan yang baik.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Peningkatan jumlah komite audit akan berdampak pada peningkatan ROE yang ada. Hal ini dimungkinkan komite audit sudah mampu menjalankan fungsinya secara efektif, membuat kontrol menjadi lebih baik yang berakibat konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi akan memperburuk profitabilitas perusahaan.



## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan untuk mempertimbangkan komisaris independen dan komite audit yang telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

### 2. Bagi Investor

Bagi investor yang hendak melakukan investasi kedalam suatu perusahaan harus lebih memperhatikan indikator penerapan GCG dari suatu perusahaan tersebut. Salah satu cara pengukuran berhasil atau tidaknya penerapan GCG yakni dengan melihat kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja keuangannya.

### 3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti indikator indikator dari GCG agar lebih memperluas wawasan tentang GCG. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti di sektor lain, hal ini dapat menambah wawasan tentang keadaan GCG di setiap sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2015). "*Corporate Governance and Firm Performance: Evidence from Textile Sector of Pakistan*". *Journal of Asian Business Strategy*, Volume 4 (12) Hal 200-207.
- Aprinita, B. S. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2009), 33(1), 146–153.
- Aulia Nuranto, A., & Ardiansari, A. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan, *Firm Size*, dan *Market Effect* terhadap Tingkat Kebangkrutan. *Management Analysis Journal*, 6(2).
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bukhori, I. (2012). "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan" ( Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010).
- Candradewi, I., Bagus, I., & Sedana, P. (2016). ISSN : 2302-8912 Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Return On Asset*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(5), 3163–3190.
- Fahriani, M. (2016). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5.
- Ferdinand, Augusty. (2014). *Metode Penelitian Manajermen Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit - Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariant dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 8*. Undip.
- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Jurnal Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, (Vol. 3 No 2 ISS).

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Haryanto, S. (2014). Identifikasi Ekspektasi Investor Melalui Kebijakan Struktur Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan GCPI. *Journal Dinamika Manajemen*. 5(2), 183–199.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indri Hapsari, E. (2012). Kekuatan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 3(2), 101–109.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*”. *Journal of Financial Economic* 3, 305-360.
- Kautsar, A., & Madanika Kusumaningrum, T. (2015). Analisis Pengaruh *Good Corporate Gov* Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*”. *Journal of Financial Economic* 3, 305-360. *ernance* terhadap Kinerja Perusahaan yang dimediasi Struktur Modal pada Perusahaan Pertambangan yang Listed di BEI 2009-2012. *Journal of Research in Economics and Management*, 15(1).
- Khafid, Muhammad dan Diah Nurlaili, 2007. “*The Mediating Role of Accountability in The Influence of Cooperative Characteristics on its Financial Performance*”. *International Journal of Economic Research*. Volume 14 No 5.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Munawir, S. (2012). *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Murhadi R. Werner, 2015. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi, dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, F. A., & Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Karakteristik *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. *Journal of Accounting*, 3, 1–10.
- Oktavilia, Shanty., Fafurida., & Khoiruddin, Moh. 2017. “*Mapping Indutry as the Strategy for Enhancing Competitiveness of Industry in Semarang Regency*”. *Advanced Scientific Letters*, 23(8):7131-7134(4)

- Patria, P., & Yulianto, A. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. *Management Analysis Journal*, 1–16.
- Priyadi, M. P. (2013). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di BEI. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(1).
- Rahmawati, D., & Khoiruddin, M. (2017). Pengaruh *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress*. *Management Analysis Journal*, 6(1).
- Riantani, S., & Nurzamzam, H. (2015). *Analysis Of Company Size , Financial Leverage , And Its Effect to Csr Disclosure*. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 6(2), 203–213.
- Riyantina, & Ardiansari, A. (2017). *The Determinants Of Capital Structure On Consumer Goods Company Period 2011-2014*. *Management Analysis Journal*, 6(1).
- Safitri, R. D., & Yulianto, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Return Total Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Management Analysis Journal*, 4(1).
- Sanusi, Anwar. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setia Atmaja, L. (2008). *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Subiyanto, Ibnu. (2000). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sulistyowati, & Fidiana. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6, 121–137.
- Syafiqurrahman M, Andiarsyah W, & Suciningsih W. 2014. “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi*, Volume XVIII, No. 01 Hal 2144
- Syamsudin, Imronudin, Utomo, S. T., & Praswati, A. N. (2017). *Corporate Governance in Detecting Lack of Financial Report*. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 8(2), 167–176.
- Wahyono, R. E. S. (2012). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen

Labadi Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1(12), 1–21.

Wahyudin, A., & Solikhah, B. (2017). *Corporate Governance Implementation Rating in Indonesia and Its Effects on Financial Performance*.  
<https://doi.org/10.1108/CG-02-2016-0034>

Wardoyo, & Veronica, T. M. (2013). Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility & Kinerja Keuangan* terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(2), 132–149.

Wicaksono, T. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perusahaan ( Studi Empiris pada Perusahaan Peserta *Corporate Governance Perception Index ( CGPI )* Tahun 2012 ). *Journal of Accounting*, 3(2011), 1–11.

Widhianingrum, P., & Amah, N. (2012). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Selama Krisis Keuangan Tahun 2007-2009. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(2), 94–102.

Widiawati, H. S. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perbankan di Bursa Efek Indonesia, 14–21.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses 23 Januari 2018 pukul 21.00 wib

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses 2 Januari 2018 pukul 11.00 wib

Yasser, Q. R., Entebang, H., & Mansor, S. A. (2011). *Corporate Governance and Firm Performance in Pakistan : The Case of Karachi Stock Exchange ( KSE )* -30, 3(August), 482–491.

Yulianto, A. (2013). Keputusan Struktur Modal dan Kebijakan Dividen sebagai Mekanisme Mengurangi Masalah Keagenan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 4(2), 164-183.